

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 (STUDI KECAMATAN PANGEAN)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH :

DONI SYAPUTRA
NIM : 105 7600 2212

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 (STUDI KECAMATAN PANGEAN)

**OLEH : DONI SYAPUTRA
NIM. 10576002212**

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi tersebut terdapat bermacam pola dan perilaku masyarakat. Salah satu dari bentuk pola perilaku masyarakat pedesaan ialah partisipasi politik dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat secara langsung untuk menentukan masa depan daerah. Adapun salah satu fenomena masyarakat yang menarik perhatian penulis saat Pemilihan umum di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil amatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat dari beberapa kawasan pedesaan di Kabupaten Kuantan Singingi antusias untuk mengikuti pesta demokrasi lokal. Bentuk antusias masyarakat pedesaan adalah besarnya partisipasi memilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang datang ke TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang sangat mudah diamati adalah pemberian suara atau hak pilih masyarakat terhadap pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati. Disamping itu ada beberapa faktor yang menjadi penunjang dan pendukung dalam penelitian ini, agar tercapai apa yang diharapkan dalam kajian ini penulis menjadikan beberapa indikator pendukung yaitu, sosial budaya (struktur sosial budaya, kekeluargaan atau suku), lingkungan keluarga (kepala keluarga, pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu), ekonomi (mata pencaharian masyarakat, pendapatan masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat), pendidikan (tingkat pendidikan formal masyarakat, pendidikan non-formal/wawasan politik). Kecamatan Pangean yang meliputi beberapa desa dan masyarakatnya yang homogen dengan sistem kekerabatan yang bersifat gemeinschaft (persaudaraan dan solidaritas antar sesama) distribusi suara pada pemilihan umum kepala daerah Kuantan Singingi juga bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Pangean tentang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2011, penulis mengkategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dipengaruhi beberapa indikator sosial budaya, lingkungan keluarga, ekonomi, pendidikan hal ini dapat dilihat pada hasil data lapangan yang penulis rangkum dengan persentase 57.76 % pada opsi berpengaruh, sedangkan pada pilihan kurang berpengaruh adalah 28.76 %, selanjutnya pada opsi tidak berpengaruh penulis menemukan angka 13.46 %.

Kata Kunci : Partisipasi Politik dan Masyarakat Pedesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengikuti ujian Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Riau dengan Judul ” **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Studi Kecamatan Pangean)**”

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan teliti dan cermat, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan ilmu dan sarana yang dimiliki penulis. Tetapi hal ini tentunya bukan kesengajaan dari penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazir, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Mahendra Romus. M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Aprizal, S. Sos. M. Si. Selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmunya selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Suarif Kasim Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar.
7. Bupati Kuantan Singingi beserta staf yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi beserta staf yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
9. Orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara langsung maupun tersirat untuk penyelesaian studi penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, Mei 2012
Penulis

Doni Syaputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
 BAB II. KERANGKA TEORITIK	
2.1. Otonomi Daerah	10
2.2. Masyarakat Pedesaan	14
2.3. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih	18
2.4. Konsep Operasional	32
2.5. Operasional Variabel	34
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	37
3.2. Jenis Penelitian	37
3.3. Sumber Data	37
3.4. Populasi dan Sampel	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisa Data	41
 BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	42
4.2. Kondisi Geografi, Tofografi, Hidrologi, Klimatologi	43
4.3. Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	45
4.4. Keadaan Kecamatan Pangean	50

BAB V. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden.....	55
5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011.....	58
5.2.1.Faktor Sosial Budaya	58
5.2.2.Faktor Lingkungan Keluarga.....	62
5.2.3.Faktor Ekonomi.....	65
5.2.4.Faktor Pendidikan.....	68

BAB VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan	72
6.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pangen tahun 2011	7
2.1. Perbandingan Karakter Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan.....	17
2.2. Operasional Variabel Menurut Faktor dan Indikatornya	36
4.1. Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011	45
4.2. Nama Dinas dan Badan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011	48
4.3. Nama-nama Bupati Di Kuantan Singingi Tahun 2000-2011.....	49
4.4. Jumlah Kecamatan dan kelurahan/Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.....	49
4.5. Luas Wlayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangean Tahun 2010.....	52
4.6. Banyaknya Sekolah Dasar, SLTP, SLTA di Kecamatan Pangean Tahun 2011.....	53
5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jeni Kelamin.....	55
5.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	56
5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
5.4. Identitas Responden Berdasarkan BerdasarkanPekerjaan.....	57
5.5. Jawaban Responden Nilai Persatuan, Persaudaraan dan Solidaritas Terhadap Partisipasi Politik Dalam pemberian Suara.....	59

5.6.	Jawaban Responden Terdapat Sturuktur Sosial Budaya Yang Berpengaruh Terhadap partisipasi Politik Dalam pemberian Suara.....	59
5.7.	Jawaban Responden Terhadap Faktor Adat dan Kesukuan Dapat Mempengaruhi partisipasi Politik Dalam pemberian Suara.....	60
5.8.	Jawaban Responden Adaptasi Caalon Kepala Daerah Terhadap Masyarakat Pedesaan Pada Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	61
5.9.	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi partisipasi Politik Dalam Pemeberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi... ..	62
5.10.	Jawaban Responden Hubungan Kekeluargaan dan Sukuisme Dapat Mempengaruhi partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	62
5.11.	Jawaban Responden Hubungan Perkawinan/ Kepala Keluarga Berpengaruh Terhadap Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	63
5.12.	Jawaban Responden Pengaruh Pihak Ayah dan Ibu Berpengaruh Terhadap Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	64
5.13.	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap faktor Lingkungan Keluraga Memepengaruhi Partispasi Politik Dalam pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.....	65
5.14.	Jawaban Responden Terhadap Mata Pencaharian Maysrakat Apakah Berpengaruh Pada partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	65
5.15.	Jawaban Responden Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Pangean Dala Pemberian Suara.....	66
5.16.	Jawaban Responden Tentang Jumlah Tanggungan Keluarga Dapat Mempengaruhi Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara... ..	67

5.17. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor Ekonomi Mempengaruhi partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi...	68
5.18. Jawaban Responden Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara.....	68
5.19. Jawaban Responden Faktor Pendidikan Formal dan Non-Formal Apakah Berpengaruh Terhadap partisipasi Politik Dalam Peemberian Suara.....	69
5.20. Jawaban Responden Tentang Pendidikan Agama Dapat Menentukan Partisipasi Politik Dalam peemberian Suara.....	70
5.21. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor Ekonomi Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi... ..	70
5.22. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru 21 Mei 1998 silam yang ditandai dengan lahirnya reformasi kepermukaan bumi Nusantara lewat berbagai perjuangan organisasi mahasiswa telah terjadi bermacam-macam pembenahan khususnya produk-produk politik. Agenda ini adalah upaya keinginan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna. Produk politik yang dilahirkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan disusul oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Nuansa demokrasi yang mulai lahir dari awal era reformasi juga tergambar dari banyaknya partai politik peserta pemilu 1999 yang dikenal dengan istilah multi partai. Wacana demokratisasi di Indonesia tidak hanya sampai disitu, akan tetapi akan terus berjalan sesuai dengan tuntutan dan keinginan bersama para elit yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang Pemilu secara langsung.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan Pemilu ini tidak semata berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkap oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi tambah Liddle (Dalam Priyono, dkk., 2007: 43-44) adalah menjadi sistem politik yang normal dalam

kancah perpolitikan Indonesia sekarang ini. Salah satu pilar demokrasi menurut Jhon Locke (1632-1704) adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Budiardjo, 2004: 151).

Apa yang telah di jelaskan tersebut diatas bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati dilingkungan masyarakat ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suara tersebut adalah dipilihnya secara langsung Anggota DPR, DPRD, DPD Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit dimuat dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditambah dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Alfitra Salam menjelaskan bahwa apa yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan merupakan konsep yang menjadi rujukan dan untuk dilaksanakan secara arif dan bijaksana, karena Pemilukada sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-undang di atas dituntut keraifan masyarakat lokal untuk berpartisipasi politik secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Walaupun kekhawatiran sebaian kecil pakar hukum menilai masih terdapatnya kekurangan dalam peraturan tersebut. Dan yang pasti peraturan tersebut setidaknya telah mengantarkan pemilihan kepala daerah kepada pola dan mekanisme yang baru dan baik dari sebelumnya (Tabloid Dayung Riau Edisi VIII, 2005).

Salah satu daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pemilukada adalah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya pada tanggal 7 April 2011 lalu. Pemilukada kali ini merupakan awal terciptanya demokratisasi dan budaya politik lokal dalam sistem perpolitikan Tanah Air di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pakar politik Arbi sanit, ada tiga golongan kepentingan dalam Pemilukada, (a) kepentingan elit politik nasional, (b) kepentingan elit lokal, (c) kepentingan rakyat kebanyakan. Beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilukada untuk jabatan Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyisakan banyak catatan terhadap perkembangan dan keberlangsungan demokrasi. Satu di antara pilar yang disebutkan Arbi Sanit adalah kepentingan

rakyat kebanyakan tenggelam oleh dominisasi kepentingan para elit yang bertarung dalam Pemilukada tersebut (dalam AE Priyono dkk, 2007: 74).

Dari pantauan dan pengamatan beberapa daerah pemilihan Kuantan Singingi atas laporan warga terdapatnya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada, mislanya ada isu *money politic*, intimidasi terhadap warga transmigrasi dan masih banyak laporan pelanggaran lainnya (Panwas Pemilukada Kuantan Singingi, 2011). Jika diprediksi dari 330 Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pemilihan Kepala daerah (KPU Pusat 2009), Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi penulis yakini tergolong pemilihan yang kurang sukses, karena kerusuhan dan konflik yang terjadi seperti menuntut hasil peroleh suara yang tidak merasa puas dari salah seorang pasangan calon kepala daerah.

Adapun salah satu fenomena masyarakat yang menarik perhatian penulis saat Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil amatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat dari beberapa kawasan pedesaan di Kabupaten Kuantan Singingi antusiasme untuk mengikuti pesta demokrasi lokal. Bentuk antusiasme masyarakat pedesaan adalah besarnya partisipasi pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang datang ke TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang sangat mudah diamati adalah pemberian suara atau hak pilih masyarakat terhadap pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati.

Peserta Pemilukada Kuansing terdiri dari 2 pasangan calon, yaitu (1) Pasangan H. SUKARMIS - Drs. H. ZULKIFLI, M.Si, (2) Drs. H. MURSINI, M.Si - GUMPITA, SP. M.Si. Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di

atas terdiri dari berbagai profesi, ada dari birokrat, politisi dan pengusaha. Partisipasi politik masyarakat di Kuantan Singingi dalam pemberian suara terhadap masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terdistribusi secara bervariasi. Tercatat dari dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil rekapitulasi adalah pasangan H. Sukarmis – Zulkifli.

Sebagaimana yang dijelaskan Huntington dan Nelson (1948) bahwa partisipasi politik masyarakat pedesaan lebih dipengaruhi oleh rasa solidaritas antar sesama. Pendapat ini didukung oleh Amir (1997), Anwar (1997) dari penelitian yang mereka lakukan setidaknya ada beberapa nilai yang menyebabkan masyarakat pedesaan berpartisipasi, yaitu; (1) rasa persatuan dan kecintaan, (2) persaudaraan, (3) penghormatan atau ketaatan, (4) penyesuaian dan (5) kepekaan pada tanggung jawab.

Dengan demikian, lima nilai diatas secara sosial budaya di sebut Ferdinand Tönnies sebagai masyarakat yang bersifat *Gemeinschaft* yaitu adanya kehidupan bersama, dimana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata dan organik terutama dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan sebagainya pada masyarakat yang homogen (Narwoko dan Suyanto, 2004; 33).

Disamping itu ada beberapa faktor yang menjadi penunjang dan pendukung dalam penelitian ini, agar tercapai apa yang diharapkan dalam kajian ini penulis menjadikan beberapa indikator pendukung yaitu, sosial budaya

(struktur sosial budaya, kekeluargaan atau suku), lingkungan keluarga (kepala keluarga, pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu), ekonomi (mata pencaharian masyarakat, pendapatan masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat), pendidikan (tingkat pendidikan formal masyarakat, pendidikan non-formal/wawasan politik).

Kecamatan Pangean yang meliputi beberapa desa dan masyarakatnya yang homogen dengan sistem kekerabatan yang bersifat *gemeinschaft* (persaudaraan dan solidaritas antar sesama) distribusi suara pada Pemilu 2014 di Kecamatan Pangean juga bervariasi. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terdapat di Kecamatan Pangean dapat dilihat pada **tabel 1.1**. Disamping data perolehan suara masing-masing pasangan calon berikut juga akan di paparkan data pemilih tetap Kecamatan Pangean berdasarkan masing-masing desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Table. 1.1 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pangean Tahun 2011

No	Desa	DPT	M	T M	S S	S T S	NO.1	NO.2
1	Pembatang	762	583	179	578	5	437	141
2	Padang Kunik	637	462	174	458	4	201	257
3	Padang Tanggung	255	197	58	179	0	28	168
4	Teluk Pauh	267	221	46	220	1	24	196
5	Tanah Bekali	670	583	87	578	5	336	242
6	Pulau Deras	598	525	73	522	3	133	398
7	Pulau Kumpai	863	737	126	732	5	279	453
8	Pulau Tengah	391	340	51	338	2	197	141
9	Koto	277	227	50	223	4	95	128
10	Pauh Angit	1392	1031	361	1024	7	434	591
11	Sukaping	485	380	105	374	6	157	217
12	Pulau Rengas	615	392	223	392	0	300	92
13	Rawang Binjai	322	291	31	290	1	215	75
14	Pasar Baru	5179	3762	1417	3719	43	1697	2022
Jumlah		12712 (100%)	9731 (76,54%)	2981 (23,45%)	9645 (75,87%)	86 (0,67%)	4534 (47,01%)	5111 (52,99%)

(Sumber: PPK Pangean 2011)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat pedesaan yang cukup tinggi dalam pemberian suara adalah Kecamatan Pangean dan pada Pemilukada 2011 Kecamatan Pangean merupakan daerah pemilihan wilayah empat yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu (Kecamatan Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Inuman, Cerenti).

Untuk lebih jelasnya perbandingan peringkat partisipasi politik masyarakat di 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perolehan suara nomor urut satu (4534 suara), nomor urut dua (5111suara), sedangkan suara yang tidak sah (86 suara). Total suara sah (9645 Suara). Sementara hasil perolehan suara diporsentasekan nomor urut satu (47,01%), dan nomor urut dua (52,99%). Partisipasi yang di tunjukkan oleh masyarakat pedesaan di Kecamatan Pengean adalah terbukti berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah ini dapat dilihat dari persentase perolehan suara pada nomor urut dua 52,99%.

Besarnya partisipasi politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta bervariasinya tingkatan pemberian suara oleh masyarakat pedesaan terutama di Kecamatan Pangean, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “ *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Studi Kecamatan Pangean)*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah kajian penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 khususnya di Kecamatan Pangean.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya dan mempertajam khasanah keilmuan bagi perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya studi ilmu administrasi negara Universitas Islam Negeri Riau.
- b. Sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan KPUD Kuantan Singingi.
- c. Seluruh masyarakat Kuantan Singingi

BAB II

KERANGKA TEORITIK

2. 1. Otonomi Daerah

Sentralisasi kekuasaan yang berpusat di Jakarta selama lebih dari 32 tahun pemerintahan Orde baru kini sedang dipudarkan oleh proses deregulasi, privatisasi dan desentralisasi politik. Gejala ini misalnya ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang menggantikan undang-undang 22 tahun 1999. Undang-undang tersebut mendorong lokalisasi politik secara meluas dan menyebar di seluruh pelosok negeri. Seiring proses tersebut, kekuasaan politik juga makin terdistribusikan secara nyata ke pemerintah daerah. Pendeknya, desentralisasi telah menciptakan proses lokalisasi politik dan terbentuknya ruang-ruang dan arena-arena politik baru ditingkat lokal (AE Priyono dkk, 2007: 127).

Dalam undang-undang tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi pembentukan sistem politik lokal. Untuk lebih jelasnya apa itu desentralisasi dan otonomi daerah, secara harfiah desentralisasi berarti jauh dari pusat (*away from center*).

Dari perspektif politik diartikan *transference of authority, legislative, judicial, or administration, from higher level of goverment to a lower level* atau

devolusi kekuasaan pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal atau penyerahan kekuasaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan alasan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan memberikan perhatian (*Responsiveness*) dan akuntabilitas karena pemerintah daerah lebih dekat kepada warganya untuk memberikan pelayanan publik (Mukhlis Hamdi, 2006).

Dalam undang-undang 22/1999-32/2004 dijelaskan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pada BAB I Pasal 1 *point* (c), bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di *point* (h) otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2001: 243).

Menurut Ermaya Suradinata (2001. 67) bahwa penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memperhatikan pendewasaan aspek demokrasi, keadilan, pemertaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten/kota sedang provinsi sangat terbatas.

- c. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- d. Harus meningkatkan daerah otonomi.
- e. Harus meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- g. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggung jawabkan kepada yang menungaskan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal, antara lain :

1. Penataan Kewenangan

Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintah adalah melakukan penataan pemilihan kewenangan, organisasi perangkat daerah dekonsentrasi, standar pelayanan minimal serta kemitraan badan eksekutif dan badan legislatif.

2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan Birokrasi setempat.

3. Pemberdayaan Daerah

Keberhasilan otonomi daerah adalah dengan kerja keras dan disiplin semua pihak dan melalui proses serta mekanisme institusi dan konstitusi yang telah disepakati, dengan memanfaatkan segala potensi, secara rasional, efisien, efektif dan profesional.

4. Prasyarat Daerah Otonomi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonomi, yaitu (1) sumberdaya manusia aparatur yang berkeahlian, (2) adanya sumber dana untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, (3) tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.

5. Pola Daerah Otonomi

Dalam undang-undang 32 tahun 2004 dikenal tiga pola otonomi yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping sebagai daerah otonomi, provinsi juga ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian Gubernur memiliki peranan ganda (Widjaja, 2001: 90-92).

Selain pelimpahan wewenang kepada daerah, daerah otonom dituntut untuk memberdayakan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Aspek politik misalnya, sebagai bentuk mewujudkan demokratisasi di daerah dan menumbuhkan dinamika politik

lokal, dalam Undang-undang 32 tahun 2004, di atur tentang format pemilihan kepala daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam undang-undang tersebut masyarakat lebih berperan aktif menentukan pemimpinnya yang dibungkus dalam format Pemilukada langsung.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan politik desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata demi berjalannya proses demokrasi menuju demokrasi ditingkat lokal dalam kancah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, bahwa Pemilukada yang dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan demikian rakyat diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

2.2. Masyarakat Pedesaan

Antar penduduk terjadi proses dasar yang disebut dekat mendekati (*assosiatif*) dan jauh menjauhi (*dissosiatif*), proses tersebut terjadi oleh nurani manusia. Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berhubungan atau berinteraksi berdasarkan suatu hal, sebab motif atau tujuan dan interaksi itu terjadi berkali-kali menurut pola tertentu dan terbentuklah masyarakat. Setiap orang yang terlibat dalam proses itu adalah warga masyarakat yang bersangkutan. Melalui pola-pola interaksi tersebut manusia mengelola urusannya dan persoalannya (Ndraha, 2003 : 28). Sebelum mendefenisikan

masyarakat pedesaan, terlebih dahulu dijelaskan apa yang disebut dengan masyarakat dan desa. Defenisi masyarakat dan desa sangat bervariasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan pendekatan yang digunakan.

Pengertian masyarakat sederhananya ialah kehidupan sosial yang berlangsung dalam suatu wadah (Narwoko dan Suyanto, 2006: 124). Menurut Robert Mac Iver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib. Sedangkan rumusan Harold J. Laski, bahwa masyarakat yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (Budiardjo, 2004: 33-34).

Masyarakat juga disebut *community* yang diartikan sebagai masyarakat setempat, bisa merujuk kepada sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 2006:142).

Sedangkan dari pendekatan sosiologis lain, “masyarakat” sebagai suatu sistem sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcott parson bahwa sistem sosial adalah proses interaksi diantara para pelaku sosial (*action*), sedangkan yang merupakan struktur sosial adalah struktur relasi antara pelaku itu sebagaimana yang terlihat dalam proses interaksi sosial yang dimaksud sistem itu ialah sistem jaringan relasi tersebut (Narwoko dan Suyanto, 2006: 125). Lebih lanjut dikatakan bahwa karakteristik dari sistem sosial adalah kumpulan dari

beberapa unsur atau komponen dalam kehidupan masyarakat, sedangkan karakteristik lain sistem sosial sebagaimana yang dikatakan Parsons ialah cenderung mempertahankan *ekuilibrium* atau keseimbangan.

Dari pendetan kelembagaan politik, desa diartikan sebagai suatu komunitas politik yang memiliki atribut-atribut kekuasaan atau kewenangan dalam pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam di wilayah geografis komunitas masyarakatnya. Perspektif hukum, desa ialah sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki aturan-aturan komunitas lainnya. Dalam konteks undang-undang nomor 32 tahun 2004, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 2006: 132-133).

Dari pernyataan di atas, yang dimaksud masyarakat pedesaan adalah sekelompok masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan corak kehidupan yang relatif sama dan saling mengenal yang diikat dengan kehidupan tata nilai adat istiadat yang diakui dan dan dihormati secara bersama.

Untuk lebih sederhananya, masyarakat setempat diamabil dari dua komponen, yaitu masyarakat desa dan kota sebagai perbandingan karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1 : Perbandingan Karakteristik Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Masyarakat Pedesaan	Masyarakat Perkotaan
Warga memiliki hubungan yang lebih erat	Jumlah penduduk tidak menentu
Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar keluarga	Bersifat individualistik
Umumnya hidup dari pertanian	Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan
Golongan orang tua memegang peranan penting	Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antar golongan muda dengan golongan tua
Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal	Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan dari pada faktor pribadi
Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan	Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestise
Kehidupan keagamaan lebih kental	Kehidupan keagamaan lebih longgar
Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota	Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah dan lain-lain.

Sumber: Soekanto (2006: 143)

Dari tabel di atas, sangat jelas sekali perbedaan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan dan disini penulis tidak mengkaji lebih jauh perbedaan keduanya, maka yang menjadi faktor kajian dari segi politik adalah masyarakat pedesaan.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga di kemukakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak. (2000. 72) tentang ciri-ciri masyarakat desa, yaitu :

- a. Hubungan yang lebih erat dan mendalam antar mereka di bandingkan dengan warga desa lain.

- b. Pemukiman di dasarkan pada kelompok sistem kekeluargaan.
- c. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas hidup dari hasil pertanian, walaupun ada sebagian kecil masyarakatnya bermata pencaharian sektor lain, seperti berdagang, tambang, dan nelayan.

Selain dari beberapa pernyataan di atas, masyarakat pedesaan juga memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem tolong menolong, aktivitas tolong menolong hidup dalam berbagai macam bentuk masyarakat di Indonesia.
- b. Gotong royong, pola ini memerlukan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kekerabatan atau hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, aktivitas kerja sama antara sejumlah besar warga desa yang di anggap berguna kepentingan umum.
- c. Musyawarah dan jiwa musyawarah, musyawarah adalah gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya, sebagai suatu cara berapat, musyawarah di desa harus ada kekuatan atau tokoh-tokoh yang dapat mendukung proses mencocokkan, mengintegrasikan pendapat agar tidak ada perbedaan satu sama lainnya (Sajogyo dan Pudjiwati, 1999: 21-31).

2.3. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih

Para ahli ilmu politik memberikan pengertian bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep *voting behavior*. Salah seorang sarjana, Harold F. Gosnell, memberikan batasan sebagai berikut :

“Pemungutan suara adalah proses dimana seseorang anggota masyarakat dari suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan dengan demikian ikut serta dalam menentukan konsensus di antara anggota-anggota kelompok itu dalam pemilihan seseorang pejabat maupun keputusan yang diusulkan”. (Harold F. Gosnell, dalam Edwin R.A dan Saligman dan Alvin Johnson (eds). 1934: 287)

Dengan demikian pada intinya konsep *voting* itu berhubungan dengan pemberian suara dari seorang individu sebagai anggota kelompok (warga masyarakat) dalam rangka menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu atau penentuan kebijaksanaan publik.

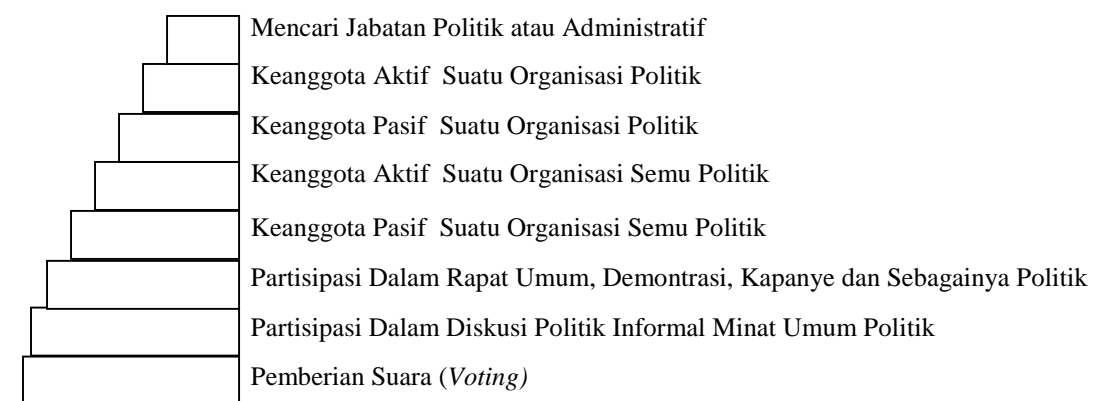
Untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada partai politik tertentu, maka dalam kepustakaan ilmu politik menurut Affan Gafar terdapat dua mazhab yang sangat dominan, yaitu mazhab Columbia dan mazhab Michigan. Mazhab yang pertama kali dikenal sebagai model atau pendekatan sosiologis, sedangkan mazhab yang kedua dikenal sebagai model atau pendekatan sosio-psikologis. (Afan Gaffar, 1992: 4-9).

Manusia dibekali dengan akal budi untuk berfikir berkarya, membangun lingkungan, serta dunia, kemudian mencipta budaya. Kesadaran potensi dan kemampuannya, berusaha memberikan bentuk-bentuk baru lebih terhadap lingkungan sekitar dan masyarakatnya. Kegiatan untuk membentuk yaitu menegakkan kondisi dan situasi lingkungan instansi atau mengubah keadaan sosial yang ada sekarang dengan menggunakan alat kekuasaan disuatu wilayah negara, hal tersebut adalah sebagai aktivitas politik (Kartono, 1996: XV).

Dua diantara tiga prinsip *trias politica* dipilih secara langsung oleh rakyat yang lebih akrab dalam bahasa politik sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Sedangkan ukuran partisipasi politik menurut Mubyanto (1975: 36) ialah keikutsertaan warga masyarakat untuk membuat keputusan politik yang menyangkut nasib mereka. Kemudian menurut Rush dan Althoff (1983), untuk melihat sejauh mana partisipasi politik yang diikuti oleh masyarakat. Hierarki partisipasi politik bisa dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Hirarki Partisipasi Politik



Sumber : Rush dan Althoff, 1983 (alih bahasa Kartono, 2003:122) Sikap apatis

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff diatas telah diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkatan atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat didalamnya. Namun sebaliknya semakin kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Apakah yang dinamakan partisipasi politik itu, sebagaimana definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. (Miriam Budirjo:1998. 1-2). Untuk lebih jelasnya, dibawah ini ada beberapa pendapat para sarjana yang bergelut dibidang politik, diantaranya:

1. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*.

”Partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung. Dalam proses pembentukan kebijakan umum”.(Herbert McClosky: 1972. 252).

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*.

“ Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”.(Norman H. Nie dan Sidney Verba: 1975. 1)

Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” (*the authoritative allocation of values for a society*).

2. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.(Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1977. 3)

Keterangan diatas di tambahkan Huntington dan Nelson (1948: 16-18)

dalam bentuk-bentuk partisipasi politik antara lain:

- Kegiatan Pemilihan

Mencakup memberi suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

- Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

- Kegiatan Organisasi

Menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, tujuan utamanya, dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

- Mencari Koneksi (*contacting*)

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

- Tindakan Kekerasan (*violence*)

Sebagai upaya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda, kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pemimpin politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan atau mengubah sistem politik).

Dalam perilaku politik sebagaimana yang dilakukan Erbe (1964), Hansen (1975), menyimpulkan bahwa semakin tinggi kelas sosial ekonomi semakin cenderung individu mendaftarkan diri sebagai pemilih, memberikan suara, tertarik pada politik, membahas soal politik, menjadi anggota organisasi yang mempunyai arti penting secara politis, dan berusaha mempengaruhi sikap orang lain. Sedangkan di lingkungan orang yang berpendidikan mereka menyatakan, yaitu : kalangan menengah diterangi dengan tingkat partisipasi politiknya yang tinggi dari pada masyarakat yang kurang berpendidikan (dalam Narwoko dan Suyanto, 2006: 190).

Sedangkan Milbrath menggabungkan beberapa pendapat yang menurutnya ada empat faktor yang mensugestikan partisipasi politik masyarakat secara bervariasi, empat faktor tersebut, yaitu (1) sejauh mana orang menerima perangsang politik, (2) karakteristik pribadi seseorang, (3) karakteristik sosial seseorang, (4) keadaan politik atau lingkungan politik dimana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (dalam Rush dan Althoff, 2003: 165).

Lebih jauh Rush dan Althoff menambahkan semakin peka atau terbuka seseorang terhadap pasangan politik lewat kontrak pribadi dan organisatoris

makin besar kemungkinannya turut serta dalam kegiatan politik. Seseorang yang termasuk dalam suatu keluarga yang sering melakukan diskusi politik, atau menjadi anggota dari suatu organisasi yang mendorong aktivitas politik, akan terdorong pula dalam kegiatan politik (2003: 165-166).

Harun dan Sumarno (2006: 81) menambahkan, bahwa komunikasi politik juga berperan aktif dalam pembentukan proses partisipasi politik masyarakat. Dalam komunikasi politik, komunikasi merupakan unsur dinamis untuk membentuk sikap dan perilaku politik yang bersifat integritas dan komit terhadap sistem yang sedang berlangsung sekaligus melestarikannya.

Menurut mereka ada 4 (empat) bentuk kegiatan komunikasi politik yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik para pemilih, adalah sebagai berikut;

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinyan terhadap gejala politik, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadiannya (Rush dan Althoff, 2003: 25).

2. Pendidikan Politik

Menurut R. Hayer (dalam Kartono, 1996: 64) pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam politik. Singkatnya pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional,

disengaja dan sistematis, untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Dari hasil pendidikan politik tersebut diharapkan terjadinya perubahan sikap rakyat, yaitu dari sinisme politik, kefasifan dan apatisme politik beralih menjadi bentuk “antusiasme politik (kegairahan politik), sikap aktif partisipatif, produktif, berinisiatif, proaktif, inovatif, progresif, dan demokratis (Kartono, 1996: 56).

3. Perilaku dan Sikap Politik

Menurut Rusadi Kartaprawira menyatakan bahwa perilaku politik sebagai salah satu telaah tentang tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Dengan demikian, maka tipe budaya politik dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian, yaitu; (1) budaya politik parokial, yakni pelaku politik memerankan di dalam berbagai bidang politik, dikarenakan belum adanya pengkhususan, (2) budaya politik sebagai subjek, yakni pelaku politik telah memiliki kesadaran cukup tinggi dan loyalitas kepada pemimpin yang cukup besar, (3) budaya politik sebagai peserta, yakni masyarakat telah memiliki tingkat kesadaran politik tinggi dan aktif di dalam memainkan peran politik, baik sistem, ataupun input dan outputnya, (4) budaya politik campuran, yakni tipe budaya politik subjek partisipan, tipe budaya politik partisipan parokial dan tipe budaya politik warganegara (dalam Harun dan Sumarno, 2006: 102-103).

4. Perilaku Kebersamaan

Tingkah laku sosial adalah tingkah laku individu yang terbentuk karena pengaruh ransangan proses sosial. Munculnya proses sosial dikarenakan oleh kebiasaan, adat, cara hidup dan norma-norma yang dihargai kelompok bersangkutan dan kondisi seperti ini biasanya ada faktor mobilisasi massa dari sistem politik yang sedang berjalan, sehingga semua komponen berkehendak untuk menyamakan persepsi atau pandangan dalam setiap keputusan politik.

Sedangkan perilaku kebersamaan bisa juga dibentuk oleh kepribadian politik. Menurut Harold Lasswell tipe kepribadian politik yang akan mempengaruhi perilaku kebersamaan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) Agitor politik, yaitu seseorang yang mahir dalam bidang kontak pribadi dan terampil dalam usaha membangkitkan emosi-emosi politik massa, (2) Administrator politik, yaitu seseorang yang terampil dalam memanipulasi organisasi-organisasi dan ide-ide mempengaruhi sikap orang lain, (3) Birokrasi politik, yaitu orang yang sangat menekankan peraturan-peraturan formal dan organisasi serta merealisasikannya dalam situasi tertentu (Maran, 2001: 140-141).

Partisipasi politik dalam pemberian suara tidak terlepas dari perilaku politik masyarakat. Perilaku politik yang dimaksudkan di sini adalah perilaku atau sikap pemilih. Dalam perilaku pemilih, pertanyaannya adalah mengapa masyarakat menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan tertentu atau calon tertentu dan bukan calon lain. Menurut Surbakti (1999:145-146) untuk melihat hal ini setidaknya ada beberapa pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial.

1. Pendekatan Struktural

Kegiatan memilih sebagai produk dari struktur yang lebih luas, seperti: struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan, dan program yang ditonjolkan. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa serta bahasa.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam pemilihan anggota legislatif dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota atau Desa), Pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

3. Ekologis

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

4. Psikologi Sosial

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas kontestan yang ada atau keterikatan emosional terhadap kontestan tertentu tanpa bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Model ini menurut Byrne (1996) setiap individu tertarik pada suatu hal atau seseorang yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama dengan dirinya (Firmanzah, 2007: 114)

Berangkat dari pendapat diatas, ada dua hal yang dijadikan ukuran mengenai cara orang memilih terhadap partai dan kontestan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan mengenai cara pemecahan masalah (*policy problem solving*)

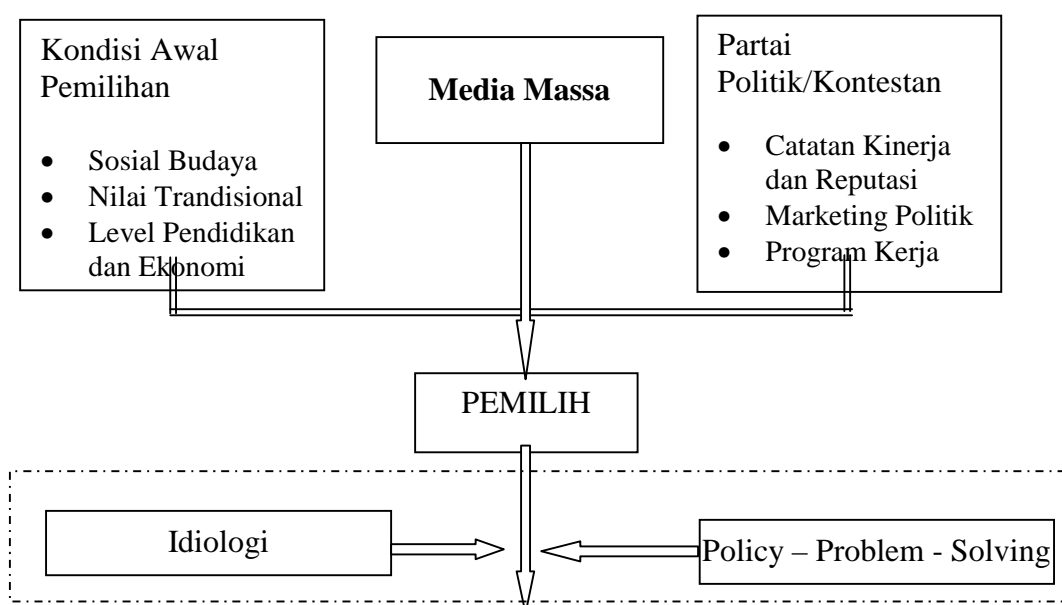
Fiorina (1981) serta Enelow dan Hinich (1984) menyimpulkan bahwa pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas kontestan dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin efektif seorang kontestan dalam menawarkan solusi tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih oleh pemilih. Chappel dan Viega (2000) mencontohkan dari aspek ekonomi, dimana persoalan ekonomi menjadi pusat perhatian, karena erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Kesamaan dalam faham serta nilai dasar ideologi dengan salah satu partai.

Ideologi dianggap sebagai identitas yang menyatukan satu kelompok atau golongan dan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok atau golongan lain (Gerring, 1997). Ideologi melingkupi semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritus dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat (Firmanzah, 2006: 116-121).

Pendapat-pendapat di atas oleh Firmanzah dipahami sedemikian rupa untuk mengenal faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa dan bagaimana orang memilih. Penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2
Faktor Determinan Memilih



Sumber : Firmanzah, 2007 : 129

Dari gambar di atas dijelaskan Firmanzah, bahwa partisipasi pemilih dengan dipengaruhi tiga faktor, yaitu;

a. Kondisi Awal Pemilih

Kondisi awal diartikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri si pemilih, masing-masing individu mewarisi dan memiliki sistem nilai serta kepercayaan dan kemampuan yang berada satu sama lain, disamping itu tingkat pendidikan dan ekonomi juga diyakini dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan. Selain itu faktor lingkungan dimana pemilih berada dan berinteraksi pun sangat penting dalam hal ini, umpamanya kondisi sosial budaya dan nilai tradisional.

b. Media Massa

Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik sendiri ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat.

c. Partai Politik atau Kontestan

Atribut kontestan seperti reputasi, image, citra, latar belakang, ideologi dan kualitas para politikus akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat atas partai bersangkutan atau kontestan (Firmanzah.2007: 129-132).

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemberian suara tersebut, maka dapat dibagi tipologi pemilihan ke dalam 4 (*empat*) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai atau kontestan dalam program kerjanya.

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

3. Pemilih Tradisional


Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam mengambil keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai dan kontestan.

4. Pemilih Skeptis

Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai suatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik atau tim sukses lainnya sangat kurang, karena ikatan ideologi mereka memang rendah sekali (Firmanzah, 2007: 134-138).

Sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, maka partisipasi masyarakat secara umum adalah terlibatnya warga negara secara langsung dalam memberikan suara terhadap kegiatan pemilihan anggota legislatif, baik tingkat daerah kabupaten/kota atau pada tingkat yang lebih tinggi.

Dijelaskan dalam alqur'an tentang penggunaan hak berpartisipasi.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾


"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (An-Nisaa :58)

2.4. Konsep Operasional

a. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pemimpin negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

b. Masyarakat Pedesaan adalah sekelompok masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan corak kehidupan yang relatif sama dan saling mengenal yang diikat dengan kehidupan tata nilai adat istiadat yang diakui dan dihormati secara bersama.

c. Pemberian Suara adalah aktivitas masyarakat dalam berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi, pemeberian suara oleh masyarakatlah yang akan menentukan suksesnya suatu kegiatan politik yang dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun.

d. Pilkada adalah suatu proses pemilihan kepala daerah yang diatur dengan undang-undang dan sisten serta regulasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kegiatan untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan dan peran serta”.

Pengertian tentang partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya.

Lebih jauh dijelaskan oleh Keith Davis dalam Sastropoetro bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.

Selanjutnya Korten dalam Khadiyanto mendefinisikan partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain, Poerbakawatja memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Lain halnya dengan definisi partisipasi menurut Suherlan dalam Khadiyanto. Menurutnya, partisipasi diartikan sebagai dana yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada proyek-proyek pemerintah. Selain itu, partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi di atas, Khadiyanto merumuskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

Partisipasi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu jenis aktivitas dalam suatu proses pengambilan bagian dalam suatu kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan yang berbentuk politik, hukum, sosial, budaya maupun kegiatan ilmiah yang diikuti sesuai prosedur dan aturan yang ada.

2.5. Operasional Variabel

Merujuk pada pendapat Mochtar Mas'ood (1990: 90) definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (menggambarkan) kegiatan yang harus dilakukan kala hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Sedangkan operasional secara sederhana merupakan penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari suatu variabel.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan pada kerangka pikir penelitian di atas, maka kerangka pikir penelitian akan sesuai dengan keadaan masyarakat pedesaan digambarkan sesuai dengan kerangka pikir penelitian.

1. Faktor Sosial Budaya

Yang dimaksud dengan faktor sosial budaya adanya ikatan primordialisme antara pasangan calon maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas etnis, suku, struktur sosial budaya, atau sentimen keaderah (narwoko dan Suyanto, 2006: 200).

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Yang dimaksud faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Yang dimaksud faktor ekonomi yang menjadi ukuran adalah mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

4. Faktor Pendidikan

Yang dimaksud faktor pendidikan adalah dilihat dari tingkat pendidikan formal dan non-formal serta pendidikan politik masyarakat pedesaan.

Tabel 2.2. : Operasionalisasi variabel Menurut Faktor dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Item Penilaian
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan dalam Pemberian Suara	1. Sosial Budaya	1. Nilai Sosial Budaya 2. Struktur Sosial Budaya 3. Kekeluargaan atau Suku 4. Mampu beradaptasi
	2. Lingkungan Keluarga	1. Hubungan Kekeluargaan & Sukuisme 2. Kepala Keluarga 3. Pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu
	3. Ekonomi	1. Mata pencaharian masyarakat 2. Pendapatan masyarakat 3. Kualitas kehidupan masyarakat (Tanggungan Keluarga)
	4. Pendidikan	1. Tingkat pendidikan formal masyarakat 2. Pendidikan non-formal (wawasan politik) 3. Pendidikan agama

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Pangean Tahun 2011.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi berdasarkan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur ukur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang diteliti dan terakhir berusaha memprediksinya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field*).

3.3. Sumber Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber aslinya (Suryabrata, 2003: 39). Adapun data-data primer tersebut meliputi sebagai berikut :
 1. Data yang berkaitan dengan identitas responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, keluarga maupun sosial budaya kemasyarakatan.

2. Data tentang bentuk-bentuk atau tipologi masyarakat pemilih di Kecamatan Pangean pada Pemilu 2011 yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, wawancara, dan survei lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan yang bersumber dari dokumen, laporan arsip yang didapatkan dari pihak-pihak terkait. Adapun data-data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sejarah dan gambaran umum kecamatan Pangean
 2. Laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 di Kecamatan Pangean.
 3. Dan data lainnya yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian.

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan masyarakat pemilih di Kecamatan Pangean dengan jumlah pemilih 12.712 orang yang terdiri dari 14 desa.

a. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini tokoh adat, alim ulama, pimpinan desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat lokal, tokoh perempuan adalah berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005: 156).

$$n = \frac{N}{1 + \frac{N(e)^2}{N}}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{12.712}{1 + 12.712 (10\%)^2}$$

$$= \frac{12.712}{1 + 12.712 (0,01)^2}$$

$$= \frac{12.712}{1 + 12.712 (0,01)}$$

$$= \frac{12.712}{12.713 (0,01)}$$

$$= \frac{12.712}{127,13}$$

$$= 99,99$$

$$= 100 \text{ orang}$$

Jadi, dari perhitungan jumlah populasi sebesar 12.712 orang dengan jumlah kelonggaran 10 %, maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 100 orang. Teknik yang

digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan secara acak.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam atau *dept*, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun alat pencatat.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan atau terjun langsung ke lokasi penelitian.
- c. Angket, yaitu berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah peneliti sediakan.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Menurut Lexi J. Moleong (1988; 177) penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Hal ini mungkin dapat dipenuhi karena peneliti langsung ke lapangan melakukan

pengamatan dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empirik, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum kausalitas atau sebab akibat yang mempengaruhi faktor-faktor partisipasi dan kecenderungan bentuk atau tipologi pemilih masyarakat pedesaan. Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisa data secara empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

Zaman dahulu Kuantan Singingi yang dikenal dengan sebutan Rantau Kuantan merupakan suatu daerah yang berada dibawah Pemerintahan Datuk sebagai pemegang teraju adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Daerah ini juga disebut Rantau Nan Kurang Oso Duo Pulau artinya rantau yang kurang satu dari dua puluh dengan demikian ada 19 rantau yang tercakup didalamnya yaitu meliputi kenegerian disepanjang aliran Sungai Kuantan yang dimulai dari Lubuk Ambacang dibagian Hulu sampai ke Cerenti sebagai bagian hilir (UU Hamidi, 1995: 1).

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dimana pemerintah yang tadinya dibawah pemerintahan datuk, kini berubah bentuk menjadi sistem dan corak pemerintahan modern yang merupakan penjabaran UUD 1945 yang berlaku di negara ini dan begitu juga halnya pada 19 rantau yang kini sudah dibagi desa-desa yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sepintas melihat dari sejarah berdirinya, Kuantan Singingi dapat dikatakan sebagai Kabupaten baru. Pada awalnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang pada waktu itu sebagai Kabupaten Induk. Dengan bergulirnya Era Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, semua bentuk otoritas kekuasaan yang terpusat kepada pemerintahan yang otoriter, menutup mati sistem demokrasi yang berkembang, sehingga momen ini membuka ruang

gerak yang begitu luas bagi Tokoh dan Masyarakat Kuantan Singingi dalam menyuarkan aspirasinya terhadap pembentukan Kabupaten baru.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya dibawah pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah Kecamatan. Namun setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah kabupaten defentif yang mempunyai 12 kecamatan.

4.2.Kondisi Geografis, Tofografi, Hidrologi, Klimaologi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang berkembang dengan pesat dapat dilaihat dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak pada :

- 0⁰ 00 Lintang Utara – 1⁰ 00 Lintang Selatan.
- 101⁰ 02 Bujur Barat – 101⁰ 55 Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Lebih 7.656,03 Km Bujur Sangkar, dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 Meter dari permukaan laut.

Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Propinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu. (Kuansing Dalam Angka, Tahun 2011)

Kabupaten Kuantan Singingi sebagian bagian dari Provinsi Riau terletak pada jalur perhubungan lalu lintas darat antara Provinsi Sumatra Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan lalu lintas darat dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) dapat ditempuh dengan jarak yang begitu singkat sehingga mobilitas masyarakat cukup tinggi. Termasuk hubungan perdagangan dengan Provinsi Sumatra Barat berjalan lancar, dikarenakan kedekatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi tersebut juga tidak terlalu jauh sehingga mudah dijangkau.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Keberadaan kedua sungai itu memiliki potensi dan peranan yang begitu besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap sungai dalam memanfaatkannya sebagai sumber air bersih, budidaya perikanan dan sumber daya buatan tenaga listrik.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $32,6^{\circ}\text{C}$ – $36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C}$ – $22,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 74,00 – 327,50 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September s.d Februari.
- Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s.d Agustus. (Kuansing Dalam Angka Tahun 2011)

4.3. Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.3.1. Penduduk

Permasalahan umum kependudukan adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas. Kabupaten Kuantan Singingi juga menghadapi permasalahan yang sama.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Senada dengan Kabupaten lain, permasalahan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 2011 berjumlah 320.314 jiwa dengan jumlah laki-laki 165.233 jiwa dan perempuan 155.081 jiwa. Dapat dilihat dari table berikut :

Tabel. 4.1. : Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	165.233 Jiwa
2	Perempuan	155.081 Jiwa
Total		320.314 Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuantan Singingi Tahun 2011

4.3.2. Tenaga Kerja

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja (demand) yang cukup akan menciptakan pengangguran.

4.3.3. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribu kota di Teluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Pada tahun 2001 Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 6 kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa, definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Perda Nomor. 16 Tahun 2002, Maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Kini, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 198 desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru berdiri tanggal 12 Oktober 1999, secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, sistem pemerintahan pada akhirnya lebih bersifat desentralisasi walaupun belum secara keseluruhan. Berdasarkan sistem itu pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wewenang dalam menentukan bidang pemerintahannya. Kabupaten Kuantan Singingi didalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, Bupati dalam menggerakkan aktivitas pemerintahannya telah membentuk Struktur organisasi Tata kerja (SOT) baru atas dasar Peraturan Daerah No. 34 sampai dengan 59 Tahun 2001 yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, 17 (tujuh belas) Dinas, dan 5 (lima) Badan, untuk lebih jelas jumlah dinas dan badan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2. : Nama Dinas dan Badan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011

No	Dinas	No	Badan
1	Dinas Pendapatan	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2	Dinas Pendidikan	2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Bencana Alam
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat
4	Dinas Kesehatan	4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Dinas Kehutanan	5	Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi
6	Dinas Tanaman Pangan		
7	Dinas Perkebunan		
8	Dinas Perikanan		
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
10	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
11	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
12	Dinas Pasar Kebersihan		
13	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga		
14	Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi		
15 16 17	Dinas Peternakan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka 2011

Dinas dan Badan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membantu kegiatan Bupati dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari yang sesuai dengan wewenang, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sejak berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 1999, Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki kepala daerah yang menjadi kepala daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.3. : Nama-nama Bupati di Kuantan Singingi Tahun 2000-2011

Nama Pejabat	Jabatan	Masa Jabatan
1. Drs. Rusdji S. Abrus	Bupati	Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'far	Bupati	Tahun 2001 - 2005
3. H. Sukarmis	Bupati	Tahun 2006- sekarang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan definitif yang mencakup 11 Kelurahan, 198 Desa definitif. Untuk lebih jelas jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.4. : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
1	Singingi	Muara Lembu	1	12
2	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	1	29
3	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	3	24
4	Benai	Benai	2	24
5	Kuantan Hilir	Baserah	2	26
6	Cerenti	Cerenti	2	9
7	Singingi Hilir	Koto Baru	-	12
8	Gunung Toar	Gunung Toar	-	13
9	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	-	11
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	-	13
11	Pangean	Pangean	-	14
12	Inuman	Inuman	-	9
	Total	12	11	198

Sumber: Setda Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Berdasarkan table diatas dilihat bahwa Desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik yang tercatat 29 Desa. Sedangkan urutan kedua terdapat di Kecamatan Kuantan Hilir sebanyak 26 Desa, kemudian urutan ketiga

di Kecamatan Benai yang berjumlah 24 Desa, dan Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 24 Desa. Urutan keempat Kecamatan Pangean yang berjumlah 14 Desa.

Untuk urutan yang paling sedikit desanya terdapat di Kecamatan Cerenti dan Inuman. Dengan demikian, penyebaran Desa dimasing-masing Kecamatan tidak merata, hal ini dipengaruhi oleh aspek pemekaran Kecamatan yang tidakimbang. Kondisi seperti ini juga akan berpengaruh bagi tingkat penyebaran dan kepadatan penduduk dimasing-masing wilayah Kecamatan. *(Kuansing Dalam Angka Tahun 2011)*

4.4. Keadaan Kecamatan Pangean

4.4.1. Wilayah

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 18. 957 jiwa dengan luas wilayah 145.32 Km persegi terdiri dari 14 Desa/Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Pangean adalah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat.

4.4.2. Topografi

Topologi Kecamatan Pangean adalah merupakan tanah datar dan berbukit-bukit, dengan ketinggian sekitar 65 m dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada

di Kecamatan Pangean pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

4.4.3. Iklim

Iklim di Kecamatan Pangean merupakan iklim tropis dengan suhu udara antara 20⁰ C sampai dengan 35⁰ C. Sedangkan musim yang ada di Kecamatan Pangean adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret dan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

4.4.4. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Pangean adalah Sungai Kuantan yang merupakan aliran sungai yang ada di Provinsi Riau yang bermuara di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana kecamatan tersebut memiliki luas 145.32 KM persegi, dengan jumlah penduduk 18.957 jiwa, dengan kepadatan penduduk berkisar antara 130.45. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.5. : Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan Pangean 2010

No	Desa	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
-----------	-------------	-------------	------------------------	---------------------------

1	Pembatang	8.00	1.035	129.39
2	Padang Kunik	4.00	830	207.50
3	Padang Tanggung	3.00	496	165.33
4	Teluk Pauh	6.00	441	73.50
5	Tanah Bekali	10.03	1.060	105.68
6	Pulau Deras	7.50	951	126.80
7	Pulau Kumpai	3.00	1.277	425.67
8	Pulau Tengah	3.50	634	181.14
9	Koto	2.00	483	241.50
10	Pauh Angit	9.50	2.182	229.68
11	Sukaping	6.00	689	114.83
12	Pulau Rengas	6.00	746	124.33
13	Rawang Binjai	8.43	536	63.58
14	Pasar Baru	86.36	7.597	111.13
Total		145.32	18.957	130.45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan keterangan tabel di atas jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Pasar Baru dengan jumlah penduduk 7.597 jiwa dengan kepadatan penduduk 111.13, sedangkan penduduk desa yang terkecil terdapat di Desa Teluk Pauh dengan jumlah 441 jiwa dengan kepadatan penduduk 73.50.

1.4.5 Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut

mempengaruhi tingkat sosial serta tingkat ekonomi seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik(mental), membuka sekolah umum, sekolah agama dan taman kanak-kanak di Kecamatan Pangean.

Tabel. 4.6. : Banyaknya Sekolah Dasar, SLTP/ Sederajat, SMU/ Sederajat di Kecamatan Pangean

No	Desa	SD	SLTP	SMU
1	Pembatang	1	1	-
2	Padang Kunik	1	-	-
3	Pdg Tanggung	1	-	-
4	Teluk Pauh	1	1	-
5	Tanah Bekali	1	-	-
6	Pulau Deras	1	-	-
7	Pulau Kumpai	2	1	-
8	Pulau Tengah	1	-	-
9	Koto	-	-	1
10	Pauh Angit	2	1	-
11	Sukaping	1	-	-
12	Pulau Rengas	1	-	-
13	Rawang Binjai	1	-	-
14	Pasar Baru	6	4	2
Total		20	8	3

Sumber : UPTD Pendidikan Kecamatan Pangean

1.4.6 Pekerjaan Penduduk

Sebelum Kabupaten Kuantan Singingi berdiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Indragiri Hulu, kehidupan masyarakat sampai saat Kabupaten Kuantan

Singingi menjadi kabupaten defenitif yang terlihat dalam data statistic adalah bertani dan berkebun. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Pangean menggantungkan hidupnya pada pertanian (sawah, ladang) dan perkebunan (karet dan perkebunan sawit).

Selain itu penduduk Kecamatan Pangean sebagian kecil pada sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan sektor industri kecil dan menengah. Oleh karenanya masyarakat Kecamatan Pangean kalau dilihat dari tingkat ekonomi sangat bervariasi sekali.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan angket yang disebarkan maupun dapat diklasifikasikan mengenai keberadaan responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini mengenai pengaruh partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 (studi di Kecamatan Pangean)

5.1.1. Jenis Kelamin

Adapun identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.1. : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	75	75 %
2	Perempuan	25	25 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jenis kelamin responden penelitian ini untuk Laki-laki berjumlah 75 orang (75 %) dan Perempuan berjumlah 25 orang (25 %).

5.1.2. Umur Responden

Tabel. 5.2. : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	21-27	18	18 %
2	28-34	29	29 %
3	35-41	25	25 %
4	42-48	19	19 %
5	49-55	9	9 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Data Angket, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa respondennya berumur 21-27 tahun berjumlah 18 orang (18 %), sedangkan responden yang berumur 28-34 berjumlah 29 orang (29%), responden yang berumur 35-41 tahun berjumlah 25 orang (25 %), responden yang berumur 42-48 tahun berjumlah 19 orang (19 %), dan responden yang berumur 49-55 berjumlah 9 orang (9 %).

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Untuk melihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.3. : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	15	15 %
2	SLTP	30	30 %
3	SLTA	20	20 %
4	Akademi/Sarjana	35	35 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket 2012

Dari tabel diatas terlihat pendidikan yang diraih oleh responden pada tingkat Sekolah Dasar berjumlah 15 orang (15 %). Sedangkan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat berjumlah 30 orang (30%). Responden yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah 20 orang (20%) dan yang berpendidikan Akademi dan Sarjana yaitu 35 orang (35 %).

5.1.4. Pekerjaan Responden

Untuk menganalisa responden pada penelitian yan berdasarkan pada tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.4. : Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan Responden	Jumlah	Persentase
1	Petani	35	35 %
2	Pedagang	25	25 %
3	Pegawai Negeri Sipil	15	15 %
4	Perangkat Desa	25	25 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket 2012

Dari tabel diatas terlihat identitas responden berdasarkan pekerjaan sebagai petani 35 orang (35 %). Sedangkan yang berpropesi sebagai pedagang berjumlah 25 orang (25 %). Responden yang berpropesi sebagai pegawai negeri sipil adalah 15 orang (15 %) dan responden dari tokoh masyarakat berjumlah 25 orang (25 %).

5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Pada bagian ini akan disajikan data yang diperoleh dari angket terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Data tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penyajian data berikut ini:

Berikut ini akan disajikan data yang diperoleh dari angket, dokumentasi, observasi yang telah dilaksanakan. Khusus data yang berasal dari angket akan dituangkan melalui tabel.

5.2.1. Faktor Sosial Budaya

Angket yang disebarkan berjumlah sebanyak 100 exemplar. Angket tersebut berisi 13 pertanyaan terdiri dari tiga option. Adapun data yang penulis peroleh yang akan disajikan dalam bentuk tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.5. : Jawaban Responden Nilai Persatuan, Persaudaraan dan Solidaritas Terhadap Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	75	75%
B	Kurang berpengaruh	18	18%
C	Tidak berpengaruh	7	7%
Jumlah		100	100%

Data olahan 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pedesaan pada pemilihan kepala daerah tahun 2011 di Kecamatan Pangean ternyata 75 responden atau 75 % responden menjawab berpengaruh, karena masyarakat pedesaan masih memegang dan menjunjung tinggi nilai persatuan, persaudaraan dan solidaritas sehingga berpengaruh terhadap partisipasi politik. 18 orang responden atau 18 % responden menjawab kurang berpengaruh, sedangkan 7 orang responden atau 7 % responden menjawab tidak berpengaruh.

Tabel. 5.6. : Jawaban Responden Terhadap Struktur Sosial Budaya Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	83	83%
B	Kurang berpengaruh	11	11%
C	Tidak berpengaruh	6	6%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 83 orang responden atau 83% responden menjawab bahwa struktur sosial budaya berpengaruh terhadap pemberian suara di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan menjawab kurang

berpengaruh adalah 11 orang responden atau 11 % responden, dan 6 orang responden atau 6 % responden menjawab tidak berpengaruh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah dikategorikan bahwa faktor sosial budaya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik, hal ini terlihat dari 100 orang responden, hanya 6 orang responden atau 6 % yang menjawab tidak berpengaruh, karena tingkat partisipasi politik tidak hanya diukur dari faktor sosial budaya disebabkan oleh pengaruh dan faktor yang lain lebih berpengaruh .

Tabel. 5.7. : Jawaban Responden Terhadap Faktor Adat dan Kesukuan Dapat Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	83	83%
B	Kurang berpengaruh	14	14%
C	Tidak berpengaruh	3	3%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban masyarakat pedesaan terhadap faktor adat dan kesukuan dapat mempengaruhi partisipasi di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Pangean dengan persentase 83 orang responden atau 83% responden menjawab berpengaruh, karena faktor adat dan kesukuan dapat mempengaruhi partisipasi politik, kebanyakan dari calon kepala daerah untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya harus mendekati pimpinan suku yang terlingkup dalam wilayah

keatuan adat Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan pangean, sedangkan 14 orang responden atau 14 % responden menjawab kurang berpengaruh, sedangkan yang menjawab tidak berpengaruh adalah sebanyak 3 orang responden atau 3 %.

Tabel. 5.8. : Jawaban Responden Adaptasi Calon Kepala Daerah Terhadap Masyarakat Pedesaan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Baik	80	80 %
B	Cukup Baik	15	15%
C	Kurang Baik	5	5%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai adaptasi calon kepala daerah dapat mempengaruhi partisipasi politik di Kecamatan Pangean adalah 80 orang responden atau 80% responden menjawab bahwa baik, calon kepala daerah umumnya berasal dari putra atau putri yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi kiranya hal ini menurut penulis tidak menyulitkan bagi para calon kepala daerah secara emosional, karena sudah terbangun dari masa kecil, 15 orang responden atau 15% responden menjawab cukup baik, sedangkan yang menjawab tidak baik adalah 5 orang responden atau 5%. Karena kebanyakan calon kepala daerah kurang beraviliasi dengan masyarakat, kebanyakan dari pada calon kepala daerah hanya waktu pemilihan saja melakukan pendekatan.

Tabel. 5.9. : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Partispasi Dalam Pemberian Suara Pada pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sosial Budaya	Jawaban Responden			
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
1	Nilai Sosial Budaya	75	18	7	100
2	Struktur Sosial Budaya	83	11	6	100
3	Kekeluargaan atau Suku	83	14	3	100
4	Adaptasi	80	15	5	100
Jumlah		321	58	21	400
Rata-rata		80.25 %	14.5 %	5.25 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor sosial budaya dengan jumlah rata-rata 80. 25 % responden menjawab berpengaruh, rata-rata 14.5 % responden menjawab kurang berpengaruh, rata-rata 5.25 % responden menjawab tidak berpengaruh.

5.2.2. Lingkungan Keluarga

Tabel. 5.10. : Jawaban Responden Hubungan Kekeluargaan dan Sukuisme dapat mempengaruhi partisipasi politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	78	78%
B	Kurang berpengaruh	16	16%
C	Tidak berpengaruh	6	6%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden 78 orang responden atau 78 % responden memberikan jawaban berpengaruh

bahwa masyarakat pedesaan memberikan suara pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Pangean berdasarkan hubungan kesukuan dan hubungan kekeluargaan, 16 orang responden atau 16 % responden yang menjawab kurang berpengaruhnya hubungan kesukuan dan hubungan kekeluargaan dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi , sedangkan menjawab tidak berpengaruh dalam pemberian suara adalah 6 orang responden atau 6% responden.

Tabel. 5.11. : Jawaban Responden Hubungan Perkawinan / Kepala Keluarga Berpengaruh Terhadap Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	81	81%
B	Kurang berpengaruh	7	7%
C	Tidak berpengaruh	12	12%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pedesaan menurut hubungan perkawinan /kepala keluarga dapat mempengaruhi partisipasi politik dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi ternyata jawaban responden adalah 81 orang responden atau 81 % responden menjawab berpengaruh, karena hubungan perkawinan atau hubungan sebagai kepala keluarga sangat menentukan dalam pemberian suara dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan

Singingi, yang menjawab kurang berpengaruh 7 orang responden atau 7%.

Sedangkan yang menjawab tidak berpengaruh 12 orang responden atau 12 %.

Tabel. 5.12. : Jawaban Responden Pengaruh Pihak Ayah dan Ibu Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	18	18%
B	Kurang berpengaruh	72	72%
C	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi jawaban masyarakat pedesaan dalam hubungan kekeluargaan pihak ayah dan ibu kurang berpengaruh terhadap pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, karena pihak ayah dan ibu tidak bisa menentukan pilihan dan penetapan suara dalam pemilihan umum kepala daerah disebabkan oleh hubungan kekerabatan antara ayah dan ibu terhadap keluarganya sangat jauh oleh karena itu penulis menganggap kurang berpengaruh dalam partisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dapat dilihat dari 100 orang responden, 18 orang responden atau 18% responden menjawab berpengaruh, yang menjawab kurang berpengaruh 72 orang responden atau 72% responden sedangkan yang menjawab menjawab tidak berpengaruh adalah 10 orang responden atau 10%.

Tabel. 5.13. : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor Lingkungan Keluarga Mempengaruhi Partispasi Dalam Pemberian Suara Pada pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Lingkungan Keluarga	Jawaban Responden			
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
1	Hubungan Kekeluargaan dan Sukuisme	78	16	6	100
2	Kepala Keluarga	81	7	12	100
3	Keluarga Ayah dan Ibu	18	72	10	100
Jumlah		177	95	28	300
Rata-rata		59 %	31.66 %	9.33 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai factor lingkungan keluarga dengan jumlah rata-rata 59 % responden menjawab berpengaruh, rata-rata 31.66 % responden menjawab kurang berpengaruh, rata-rata 9.33 % responden menjawab tidak berpengaruh.

5.2.3. Ekonomi

Tabel. 5.14. : Jawaban Responden Terhadap Mata Pencanharian Masyarakat Apakah Berpengaruh Pada Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	65	65%
B	Kurang berpengaruh	25	25%
C	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah berdasarkan mata pencaharian hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan berpengaruh adalah 65 orang responden atau 65% responden, kemudian 25 orang responden atau 25 % responden menjawab kurang berpengaruh, dan yang menjawab tidak berpengaruh adalah 10 orang responden atau 10%.

Tabel. 5.15. : Jawaban Responden Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Pangean Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Tinggi (> 5 Juta)	3	3%
B	Sedang (3-5 Juta)	7	7%
C	Rendah (< 3 Juta)	90	90%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat berpenghasilan di bawah 3 juta hal ini dapat mempengaruhi partisipasi politik dan dapat dilihat pada 90 orang responden atau 90 % yang menyatakan faktor tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan, karena semakin rendah tingkat pendapatan masyarakat semakin mudah di pengaruhi dalam pemberian suara dengan politik uang. sedangkan 7 orang responden atau 7 %, memberikan jawaban kurang berpengaruh, 3 orang responden atau 3 % memberikan jawaban tidak berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat semakin sulit untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemberian suara.

Tabel. 5.16. : Jawaban Responden Tentang Jumlah Tanggungan Keluarga Dapat Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Sangat Besar (> 5 Orang)	77	77%
B	Cukup Besar (3-5 Orang)	19	19%
C	Tidak Besar (< 3 Orang)	4	4%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas masyarakat di Kecamatan Pangean mempunyai tanggungan keluarga lebih dari 5 orang, hal ini sangat mempengaruhi terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat dari jawaban responden adalah sudah digolongkan berpengaruh, karena masyarakat masih bisa dipengaruhi melalui orang yang memberikan tanggungan terhadap anggota keluarga. Hal ini terbukti pada 77 orang responden atau 77% responden menjawab bahwa sangat besar, 19 orang atau 19% responden menjawab cukup besar, kemudian 4 orang responden atau 4% responden menjawab tidak besar.

Tabel. 5.17. : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor Ekonomi Mempengaruhi Partispasi Dalam Pemberian Suara Pada pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Ekonomi	Jawaban Responden			
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
1	Mata Pencarian	65	25	10	100
2	Pendapatan	3	7	90	100
3	Kualitas Kehidupan	77	19	4	100
Jumlah		145	51	104	300
Rata-rata		48.33 %	17 %	34.66 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor ekonomi dengan jumlah rata-rata 48.33 % responden menjawab berpengaruh, rata-rata 17 % responden menjawab kurang berpengaruh, rata-rata 34.66 % responden menjawab tidak berpengaruh.

5.2.4. Faktor Pendidikan

Tabel. 5.18. : Jawaban Responden Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Lulusan SLTA	82	82%
B	Lulusan SLTP	12	12%
C	Lulusan SD	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam pemberian suara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi hal ini sebanyak 82 orang

responden atau 82 % responden menyatakan jawabannya bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi politik, kemudian kurang berpengaruh sebanyak 12 orang responden atau 12 %, yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 6 orang responden atau 6%.

Tabel. 5.19. : Jawaban Responden Faktor Pendidikan Formal dan Non Formal, Apakah Berpengaruh Terhadap Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	14	14%
B	Kurang berpengaruh	76	76%
C	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 14 orang responden atau 14% responden menjawab berpengaruh, kemudian 76 orang responden atau 76% responden menjawab kurang berpengaruh, kemudian yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 10 orang responden atau 10%.

Tabel. 5.20. : Jawaban Responden Tentang Pendidikan Agama Dapat Menentukan Partispasi Politik Dalam Pemberian Suara

Opt	Alternatif Jawaban	F	P
A	Berpengaruh	12	12%
B	Kurang berpengaruh	82	82%
C	Tidak berpengaruh	6	6%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan agama dapat berpengaruh dalam partisipasi politik hal ini dapat dilihat dari 12 orang responden atau 12% yang menjawab berpengaruh, kemudian 82 orang responden atau 82% menjawab kurang berpengaruh, karena ilmu agama tidak menerangkan secara mendetail tentang ilmu politik oleh karena itu ilmu agama kurang berpengaruh terhadap partisipasi politik, sedangkan 6 orang responden atau 6% menjawab tidak berpengaruh.

Tabel. 5.21. : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor Pendidikan Mempengaruhi Partispasi Dalam Pemberian Suara Pada pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pendidikan	Jawaban Responden			
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	82	12	6	100
2	Pendidikan Formal dan Non-Formal	14	76	10	100
3	Pendidika Agama	12	82	6	100
Jumlah		108	170	22	300
Rata-rata		36 %	56.66 %	7.33 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai factor pendidikan dengan jumlah rata-rata 36 % responden menjawab berpengaruh, rata-rata 56.66 % responden menjawab kurang berpengaruh, rata-rata 7.33 % responden menjawab tidak berpengaruh.

Tabel. 5.22. : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Jawaban Responden			
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
1	Sosial Budaya	321	58	21	400
2	Lingkungan Keluarga	177	95	28	300
3	Ekonomi	145	51	104	300
4	Pendidikan	108	170	22	300
Jumlah		751	374	175	1300
Rata-rata		57.76 %	28.76 %	13.46 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan rekapitulasi akhir tabel diatas, penulis mengkategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dengan jumlah jawaban responden sebanyak 321, kemudian diikuti dengan faktor lingkungan keluarga dengan jumlah jawaban responden sebanyak 177, kemudian faktor ekonomi dengan jumlah jawaban responden sebanyak 145, selain itu faktor pendidikan dengan jumlah jawaban responden 108, dengan persentase 57.76 % pada opsi berpengaruh, sedangkan pada pilihan kurang berpengaruh adalah 28.76 %, selanjutnya pada opsi tidak berpengaruh penulis menemukan angka 13.46 %.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Adapun salah satu fenomena masyarakat yang menarik perhatian penulis saat Pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil amatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat dari beberapa kawasan pedesaan di Kabupaten Kuantan Singingi antusiasme untuk mengikuti pesta demokrasi lokal. Bentuk antusiasme masyarakat pedesaan adalah besarnya partisipasi pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang datang ke TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang sangat mudah diamati adalah pemberian suara atau hak pilih masyarakat terhadap pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Pangean tentang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2011, penulis mengkategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pedesaan faktor sosial budaya mendominasi dari faktor lingkungan keluarga, ekonomi dan pendidikan.

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah faktor sosial budaya di sebut sebagai masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* yaitu adanya kehidupan bersama, dimana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata

dan organis terutama dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan sebagainya pada masyarakat yang homogen, dalam hal faktor sosial budaya masyarakat Kecamatan Pangean diketahui bahwa terlingkup dalam satu ranji adat istiadat yaitu adat rantau kuantan yang dikenal dengan adat dan silat Pangean, penulis melihat gejala ini akan membangun paradigma politik masyarakat pedesaan lebih dekat kepada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai adat istiadat.

Faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga, hubungan perkawinan dalam sebuah masyarakat ini merupakan hal yang sangat lumrah dan biasa, karena dimanapun daerah dan wilayah kekerabatan itu lebih dekat dengan ikatan keluarga tidak terkecuali di Kecamatan Pangean. Dalam pandangan politik keluarga dan lingkungan keluarga merupakan hal yang sangat penting karena pendekatan yang paling utama pada keluarga dan dilingkungan keluarga adalah seorang kepala keluarga.

Faktor ekonomi adalah mata pencarian dan pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Pangean, faktor ekonomi menurut penulis dalam kajian ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemberian suara dalam pemilihan umum kepala daerah. Di Kecamatan Pangean termasuk tingkat ekonomi masyarakatnya tergolong rendah karena pada umumnya masyarakat Kecamatan Pangean berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi berkebun. Menurut hemat penulis semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat semakin mudah dalam pemberian suara, karena masyarakat masih terpengaruh dengan politik uang, dan bentuk *iming-iming* politik yang lain.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam merubah paradigma dan pola fikir dengan jalan mengkaji dan menggali dengan potensi akal dan naluri yang diberikan tuhan, dalam hal ini pendekatan kajian ini penulis mengkaji partisipasi dalam pandangan pendidikan formal dan non-formal serta pendidikan politik masyarakat pedesaan, karena pendidikan dalam hal apapun tidak terkecuali dalam bidang politik merupakan hal yang paling utama. Pendidikan menurut kajian penulis adalah pendidikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Pangean tingkat pendidikan masyarakat sudah tergolong tinggi dan sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangean berpendidikan, sehingga faktor pendidikan merupakan faktor pendukung terbentuknya sebuah kegiatan dan usaha berpartisipasi dalam politik.

6.2.Saran

Adapun hasil dari kajian yang di bahas di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Pangean patut di acungi jempol, karena masyarakat pedesaan dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilihnya, hal ini sesuai dengan ukuran tingkat partisipasi politik yang tinggi yang penulis lakukan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemilihan umum kepala daerah (menggunakan haknya) sesuai dengan keinginannya.

3. Perlu kiranya penataan kembali sistem pendaftaran yang lebih terbuka dalam pendataan pemilih, pemerintah juga harus aktif dalam mendata agar masyarakat terdaftar secara merata dan bisa menggunakan haknya sebagai pemilih.
4. Agar masyarakat pedesaan sadar dengan hak yang dimilikinya untuk mengikuti pesta demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Nul Karim.

Budiardjo Meriam, Prof., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004

_____, *Partisipasi Dan partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

_____, (ed), *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Gramedia, 1982.

Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hungtington P, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1984

Hamdi, Mukhlis. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Universitas Riau, Pekanbaru, 2006.

Harold F. Gosnell, dalam Edwin R.A dan Saligman dan Alvin Johnson (eds). 1934.

Gaffar. Afan. *Partispasi Politik dari masa kemasa*.1992.

Kartono Kartini, Dr., *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

Mas'oed, Mocktar, *Studi Hubungan Internasional; Tingkat Analisis Teorisi*, Yogyakarta, Pusat Antara Universitas Studi Sosial UGM, 1990.

Moleong, Lexi J. Dr.MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.

Mubyanto, *Partisipasi Politik*, Bandung, 1975

Narwoko Dwi, J., Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006

Ndraha, Taziliduhu, *Keybernology; Ilmu Pemerintahan Baru*, Edisi I, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Pasaribu, Dra., B. Simanjuntak, Drs. SH., *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, Tarsito, 1986.

Priyono AE., dkk, *Menjadikan Demokrasi Bermakna “Masalah dan Pilihan Di Indonesia*, Jakarta, Demos, 2007.

Rush Michael, Althof Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.

Sanit, Arbi, *Aneka Pandangan Fenomena Politik GOLPUT*, Pustaka Sinar Harapan, 1992.

_____, *Ormas Dan Politik*, Jakarta, Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung. 2005.

Suryabrata, Sumadi, BA., Drs., Ed.S., Ph.d., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Subakti, *Perilaku Memilih Masyarakat Pedesaan*. 1999.

Sajogyo dan Pudjiwati, *Politik Masyarakat Pedesaan*. 1999

Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah. UNRI.2006.

Tabloid Dayung Riau Edisi VIII, 2005.

Widjaja., HAW., Prof., Drs., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Rajawali Press, 2001